

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN Sulawesi Utara

2020



PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN

Sulawesi Utara

2020



PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN SULAWESI UTARA 2020

No ISSN : 2598-2621
No Publikasi : 71000.2117
Katalog BPS : 3205011.71

Ukuran Buku : A4 (21 cm x 29 cm)
Jumlah Halaman : xii+40

Naskah:
BPS Provinsi Sulawesi Utara

Penyunting:
BPS Provinsi Sulawesi Utara

Gambar Kover:
BPS Provinsi Sulawesi Utara

Ilustrasi Kover:
www.freepik.com

Diterbitkan Oleh:
©BPS Provinsi Sulawesi Utara

Dicetak Oleh:
CV. Bahu Bahtera Indah

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab Umum
Asim Saputra, SST, M.Ec. Dev

Penyunting
Dendi Handiyatmo, SST, M.Si

Penulis
Lutfi Alfia, S.Si, M.AP
Didcy Mai Hendri, SST

Infografis
Dina Atika Rahmawati, SST

Gambar Kulit
Lutfi Alfia, S.Si, M.AP

<https://sulu.ps.go.id>

KATA PENGANTAR

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah. Salah satu aspek penting dalam mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah penyediaan data kemiskinan yang akurat. Setiap tahun, BPS Provinsi Sulawesi Utara menyajikan data terkait kemiskinan dan di tahun ini melalui publikasi “Perkembangan Tingkat Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara 2020”.

Publikasi ini merupakan publikasi kelima tentang kemiskinan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara yang diolah dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada periode 2015- 2020. Publikasi ini menyajikan konsep definisi dan metodologi untuk mendapatkan berbagai angka tentang kemiskinan. Data dan analisis yang disajikan dalam publikasi ini adalah keadaan Bulan Maret dan September dalam periode waktu 2015 – 2020.

Kepada semua pihak yang telah membantu diucapkan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Manado, Mei 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Utara



Asim Saputra, S.S.T, M.Ec, Dev

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://sulut.bps.go.id>

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Dan Data Yang Digunakan	2
1.3 Sistematika Penulisan	2
BAB II METODOLOGI PENGHITUNGAN PENDUDUK MISKIN	3
2.1 Metode Penghitungan Kemiskinan	3
2.2 Indikator Kemiskinan	7
2.3 Distribusi Dan Ketimpangan Pendapatan	8
BAB III PERKEMBANGAN KEMISKINAN DI SULAWESI UTARA	15
3.1 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Di Sulawesi Utara, 2015-2020.....	15
3.2 Perkembangan Garis Kemiskinan	17
3.3 Kedalaman Dan Keparahan Kemiskinan	20
BAB IV DISTRIBUSI DAN KETIMPANGAN PENGELUARAN	25
4.1 Gini Ratio	25
4.2 Kriteria Bank Dunia	26
BAB V PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN SECARA NASIONAL	29
BAB V KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISKIN SULAWESI UTARA.....	35
6.1 Karakteristik Sosial Demografi	35
6.2 Karakteristik Pendidikan	36
5.3 Karakteristik Ketenagakerjaan	37
5.4 Karakteristik Perumahan	38
5.5 Pengeluaran Per Kapita Per Bulan	40

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://sulutbps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 6.1	Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin, 2019-2020	35
Tabel 6.2	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Pendidikan Kepala Rumah Tangga, 2019-2020	37
Tabel 6.3	Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Sumber Penghasilan Utama Kepala Rumah Tangga, 2019-2020	37
Tabel 6.4	Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja, 2019-2020	38
Tabel 6.5	Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Jenis Jamban, 2019-2020 ..	39
Tabel 6.6	Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Luas Lantai, 2019-2020	39
Tabel 6.7	Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Sumber Air Minum, 2019-2020	40

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://sulutbps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara, 2015-2020	16
Gambar 3.2	Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara Menurut Klasifikasi Daerah, 2015-2020	17
Gambar 3.3	Garis Kemiskinan Sulawesi Utara, 2015-2020 (Rp/Kapita/Bulan)	18
Gambar 3.4	Perkembangan GK, GKM, dan GKNM Provinsi Sulawesi Utara, 2015-2020	19
Gambar 3.5	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Sulawesi Utara, 2015-2020	21
Gambar 3.6	Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Sulawesi Utara, 2015-2020	22
Gambar 4.1	Gini Ratio Menurut Klasifikasi Daerah di Sulawesi Utara, 2015-2020	26
Gambar 4.2	Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 Persen Terendah Menurut Daerah dan Kriteria Bank Dunia, 2019-2020	27
Gambar 5.1	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia, 2015-2020	29
Gambar 5.2	Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia, September 2020	30
Gambar 5.3	Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara dan Indonesia, 2015-2020	31
Gambar 6.1	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Per Bulan Penduduk Miskin, 2019-2020	40

Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://sulutbps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah di semua negara. Kompleksnya permasalahan kemiskinan membuatnya terus menjadi masalah serius dan penting di belahan dunia, termasuk Indonesia.

Salah satu aspek penting untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan perdesaan. Sejak tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun. Hal ini bisa terwujud karena sejak tahun 2003 BPS mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Maret.

1.2 RUANG LINGKUP DAN DATA YANG DIGUNAKAN

Ruang lingkup publikasi ini mencakup tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara menurut daerah perkotaan dan perdesaan pada kondisi September 2020. Disajikan juga data series mulai dari Maret 2015 untuk menampilkan perkembangan tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara. Sumber data yang digunakan dalam berbagai analisa pada publikasi ini adalah data Susenas Kor dan Konsumsi/Pengeluaran.

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I menjelaskan latar belakang penulisan, ruang lingkup dan data yang digunakan serta sistematika penulisan. Bab II menjelaskan tentang konsep kemiskinan yang digunakan, metode penghitungan garis kemiskinan, profil kemiskinan, ukuran kedalaman kemiskinan, ukuran keparahan kemiskinan, dan ukuran distribusi dan ketimpangan pendapatan. Bab III membahas tentang jumlah dan persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, kedalaman kemiskinan, dan keparahan kemiskinan. Bab IV membahas distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk menurut daerah perkotaan dan perdesaan di Sulawesi Utara. Bab V membahas perbandingan tingkat kemiskinan secara nasional. Bab VI membahas tentang karakteristik rumah tangga penduduk miskin, yaitu keterangan demografi dan fasilitas perumahan.

BAB II METODOLOGI PENGHITUNGAN PENDUDUK MISKIN

2.1 METODE PENGHITUNGAN KEMISKINAN

- **Konsep**

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

- **Sumber Data**

Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Modul Konsumsi dan Kor yang dilaksanakan pada bulan Maret dan September.

- **Metode**

Metode yang digunakan adalah menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing provinsi daerah perkotaan dan perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan

diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

- **Teknik Penghitungan Garis Kemiskinan**

Tahap pertama adalah menentukan penduduk referensi yaitu 20 persen penduduk yang berada di atas Garis Kemiskinan Sementara. Garis Kemiskinan Sementara yaitu Garis Kemiskinan periode lalu yang di-inflate dengan inflasi umum (IHK). Dari penduduk referensi ini kemudian dihitung GKM dan GKNM.

GKM adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari. Penyetaraan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dilakukan dengan menghitung harga rata-rata kalori dari ke-52 komoditi tersebut. Formula dasar dalam menghitung adalah:

$$GKM_{jp} = \sum_{k=1}^{52} P_{jkp} \cdot Q_{jkp} = \sum_{k=1}^{52} V_{jkp}$$

GKM_{jp} = Garis Kemiskinan Makanan daerah j (sebelum disetarakan menjadi 2100 kilokalori) provinsi p.

P_{jkp} = Harga komoditi k di daerah j dan provinsi p.

Q_{jkp} = Rata-rata kuantitas komoditi k yang dikonsumsi di daerah j di provinsi p.

V_{jkp} = Nilai pengeluaran untuk konsumsi komoditi k di daerah j provinsi p.

j = Daerah (perkotaan atau perdesaan).

p = Provinsi ke-p.

Selanjutnya GKM_j tersebut disetarakan dengan 2100 kilokalori dengan mengalikan 2100 terhadap harga implisit rata-rata kalori menurut daerah j dari penduduk referensi, sehingga:

$$\overline{HK}_{jp} = \frac{\sum_{k=1}^{52} V_{jkp}}{\sum_{k=1}^{52} K_{jkp}},$$

K_{jkp} = Kalori dari komoditi k di daerah j provinsi p.

\overline{HK}_{jp} = Harga rata-rata kalori di daerah j provinsi p.

$$GKM_{jp} = \overline{HK}_{jp} \times 2100$$

GKM = Kebutuhan minimum makanan di daerah j, yaitu yang menghasilkan energi setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari

J = Daerah (perkotaan/perdesaan)

p = Provinsi p

GKNM merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non-makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Nilai kebutuhan minimum per komoditi/subkelompok non-makanan dihitung dengan menggunakan suatu rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok terhadap total pengeluaran komoditi/sub-kelompok yang tercatat dalam data Susenas modul konsumsi. Rasio tersebut dihitung dari hasil Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD) 2004. SPKKD adalah sebuah survei yang dilakukan untuk menentukan jenis-jenis komoditi dasar non-makanan. Responden dalam survei ini adalah rumah tangga. Nilai kebutuhan minimum non-makanan secara matematis dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$GKNM_{jp} = \sum_{k=1}^n r_{kj} V_{kjp}$$

- $GKNM_{jp}$ = Pengeluaran minimum non-makanan atau garis kemiskinan non-makanan daerah j (kota/desa) dan provinsi p.
- V_{kjp} = Nilai pengeluaran per komoditi/sub-kelompok nonmakanan daerah j dan provinsi p (dari Susenas modul konsumsi).
- r_{kj} = Rasio pengeluaran komoditi/sub-kelompok nonmakanan k menurut daerah (hasil SPKKD 2004) dan daerah j (kota+desa).
- k = Jenis komoditi non-makanan terpilih.
- j = Daerah (perkotaan atau perdesaan).
- p = Provinsi (perkotaan atau perdesaan).

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM). Persentase penduduk miskin di suatu provinsi dihitung dengan:

$$\%PM_p = \frac{PM_p}{P_p} \times 100\%$$

- $\%PM_p$ = % Penduduk miskin di provinsi p.
- PM_p = Jumlah penduduk miskin di provinsi p.
- P_p = Jumlah penduduk di provinsi p.

Sementara itu, penduduk miskin untuk level nasional merupakan jumlah dari penduduk miskin provinsi atau:

$$PM_I = \sum_{p=1}^n PM_p$$

- PMI = Penduduk miskin Indonesia.
- PMp = Penduduk miskin provinsi p.
- N = Jumlah provinsi.

Persentase penduduk miskin nasional adalah:

$$\%PMI = \frac{PM_I}{P_I} \times 100\%$$

- $\%PMI$ = Persentase penduduk miskin (secara nasional).
- PMp = Jumlah penduduk miskin (secara nasional).
- PI = Jumlah penduduk Indonesia.

2.2 INDIKATOR KEMISKINAN

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar, ada 3 indikator kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- Pertama, *Head Count Index* (HCI-P0), yaitu persentase penduduk miskin yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).
- Kedua, Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) yang merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- Ketiga, Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.
- Foster-Greer-Thorbecke (1984) telah merumuskan suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan yaitu:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha},$$

α = 0, 1, 2

z = Garis kemiskinan

y_i = Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ($i=1,2,\dots,q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

n = Jumlah penduduk

Jika $\alpha = 0$, diperoleh *Head Count Index* (P0), jika $\alpha = 1$ diperoleh Indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index*-P1) dan jika $\alpha = 2$ disebut Indeks keparahan kemiskinan (*Poverty Severity Index*-P2).

2.3 DISTRIBUSI DAN KETIMPANGAN PENDAPATAN

Pengukuran ketidakmerataan pendapatan sesungguhnya sudah dimulai jauh sebelum Simon Kuznets menyampaikan hipotesanya. Pareto (1897), setelah melakukan penelitian mengenai distribusi pendapatan di Eropa, mendapatkan bentuk kurvanya (untuk setiap negara) tidaklah mengikuti distribusi normal, tapi mengikuti perumusan sebagai berikut:

$$A = \frac{N}{X^b},$$

A = jumlah penduduk yang mempunyai pendapatan lebih besar daripada X

N = jumlah penduduk total dan

b = parameter yang nilainya antara 1 dan 2

Berdasarkan hasil tersebut, Pareto menyatakan bahwa akan selalu ditemui ketimpangan dalam setiap negara, dimana kelompok penduduk yang terkaya mendapatkan porsi yang terbanyak dari pendapatan nasional negaranya. Penemuannya ini selanjutnya dikenal sebagai Pareto Law, yang menyatakan bahwa 20 persen kelompok penduduk terkaya menikmati 80 persen dari pendapatan nasional negaranya.

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena pada dasarnya merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan selama ini didekati dengan menggunakan data pengeluaran.

Dalam hal ini analisis distribusi pendapatan dilakukan dengan menggunakan data total pengeluaran rumah tangga sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Dalam analisis ini akan digunakan ukuran koefisien Gini (*Gini Ratio*) untuk merefleksikan ketimpangan pendapatan.

Koefisien gini adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Rumus koefisien gini adalah sebagai berikut:

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n fp_i * (Fc_i + Fc_{i-1}),$$

GR = Koefisien Gini (*Gini Ratio*)

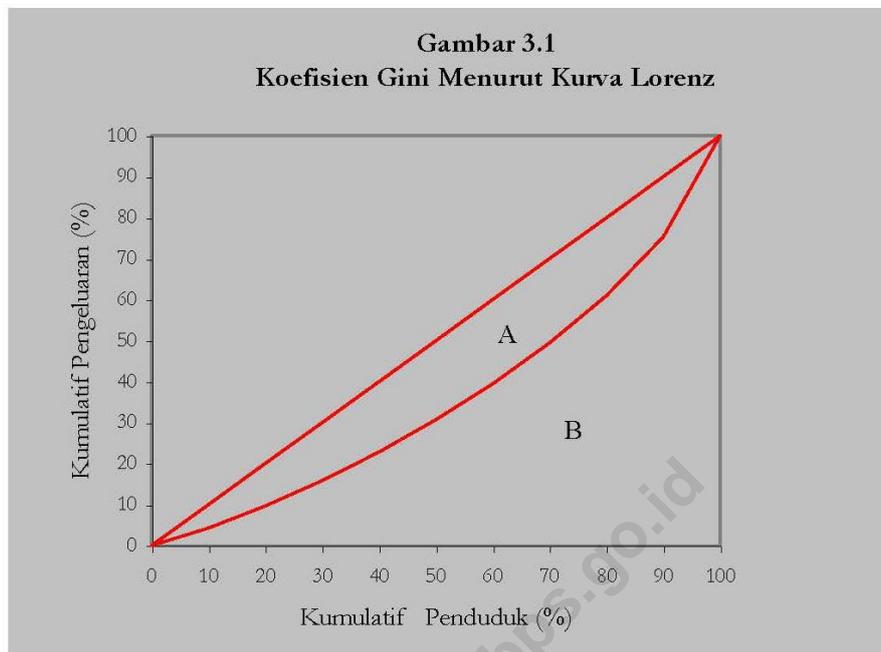
fpi = frekuensi penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

Fci = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

Fci-1 = frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke (i-1)

Nilai indeks Gini ada diantara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai indeks Gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai indeks gini adalah nol maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai satu berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna. Untuk publikasi resmi

Indonesia oleh BPS, baik ukuran ketidakmerataan pendapatan versi Bank Dunia maupun indeks Gini, penghitungannya menggunakan data pengeluaran.



Koefisien Gini didasarkan pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variable tertentu (misalnya pendapatan) dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Untuk membentuk koefisien Gini, grafik persentase kumulatif penduduk (dari termiskin hingga terkaya) digambar pada sumbu horisontal dan persentase kumulatif pengeluaran (pendapatan) digambar pada sumbu vertikal. Ini menghasilkan kurva Lorenz seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1. Garis diagonal mewakili pemerataan sempurna. Koefisien Gini didefinisikan sebagai $A/(A+B)$, dimana A dan B seperti yang ditunjukkan pada grafik. Jika $A=0$ koefisien Gini bernilai 0 yang berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika $B=0$ koefisien Gini akan bernilai 1 yang berarti ketimpangan sempurna. Namun pengukuran dengan menggunakan Koefisien Gini tidak sepenuhnya memuaskan.

Daimon dan Thorbecke (1999:5) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut.

- Pertama, variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis.
- Kedua, merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan.

Beberapa kriteria bagi sebuah ukuran ketimpangan yang baik misalnya:

- Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah. Koefisien Gini memenuhi syarat ini.
- Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*). Koefisien Gini juga memenuhi syarat ini.
- Simetris. Jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak ada perubahan dalam ukuran ketimpangan. Koefisien Gini juga memenuhi hal ini.
- Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan. Gini juga memenuhi kriteria ini.

Ukuran ketimpangan yang baik juga diharapkan mempunyai sifat:

- Dapat didekomposisi. Hal ini berarti bahwa ketimpangan mungkin dapat didekomposisi (dipecah) menurut kelompok penduduk atau sumber pendapatan atau dalam dimensi lain. Indeks Gini tidak dapat didekomposisi atau tidak bersifat aditif antar kelompok. Yakni nilai total koefisien Gini dari suatu masyarakat tidak sama dengan jumlah nilai indeks Gini dari sub-kelompok masyarakat (*sub-group*).

- Dapat diuji secara statistik. Seseorang harus dapat menguji signifikansi perubahan indeks antar waktu. Hal ini sebelumnya menjadi masalah, tetapi dengan teknik *bootstrap* interval (selang) kepercayaan umumnya dapat dibentuk.

<https://sulut.bps.go.id>

PERKEMBANGAN KEMISKINAN DI SULAWESI UTARA

Jumlah (ribu orang) dan Persentase Penduduk Miskin



Garis Kemiskinan

Septmber 2020

Rp 398.026,-
Rupiah/Perkapita/Perbulan

Maret 2020

Rp 391.197,-
Rupiah/Perkapita/Perbulan

Garis Kemiskinan menunjukkan jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan



Indeks Keparahan & Kedalaman

Indeks Keparahan Kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin

Septmber 2020

1,23 **0,30**

Maret 2020

1,14 **0,25**

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.

BAB III

PERKEMBANGAN KEMISKINAN DI SULAWESI UTARA

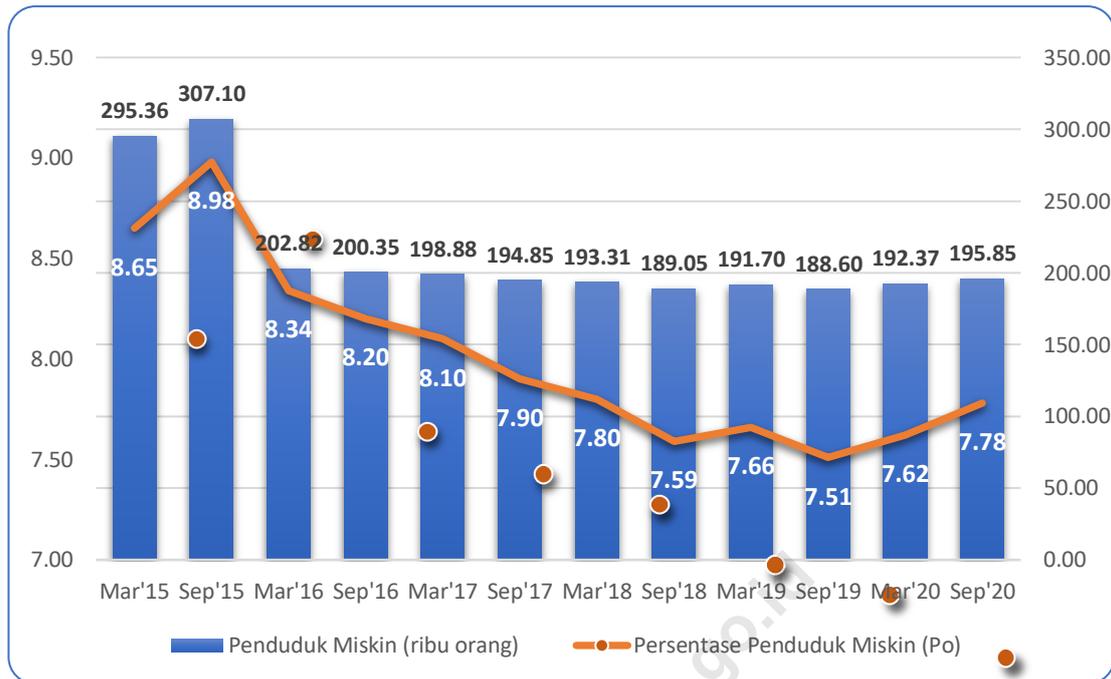
3.1 PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN DI SULAWESI UTARA 2015-2020

Tingkat kemiskinan mencakup besaran jumlah dan persentase dari penduduk miskin. Secara umum, persentase penduduk miskin Sulawesi Utara dalam lima tahun terakhir mengalami penurunan. Namun, pada Maret 2020 dan September 2020 angka kemiskinan Sulawesi Utara mengalami kenaikan (Gambar 3.1). Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 yang menyebar di Indonesia mulai Maret 2020 yang berdampak pada seluruh sektor ekonomi di Indonesia.

Persentase penduduk miskin di Sulawesi Utara pada bulan Maret 2020 mencapai 7,62 persen atau sekitar 192,37 ribu orang. Dibandingkan dengan Maret 2019, persentase penduduk miskin turun 0,04 persen poin atau turun sekitar 670 orang. Sementara jika dibandingkan dengan kondisi September 2019, persentase penduduk miskin mengalami kenaikan 0,11 persen poin. Dengan posisi ini, jumlah penduduk miskin bertambah sekitar 3.770 orang. Pandemi Covid-19 yang pada bulan Maret 2020 sudah mulai memasuki Indonesia telah berpengaruh pada sejumlah aktivitas ekonomi dan pendapatan penduduk sehingga menyebabkan tambahan orang miskin baru.

Pada September 2020, persentase penduduk miskin Sulawesi Utara kembali mengalami kenaikan. Angka kemiskinan Sulawesi Utara mencapai 7,78 persen atau sejumlah 195,85 penduduk Sulawesi Utara hidup di bawah Garis Kemiskinan. Dibandingkan dengan kondisi Maret 2020, persentase penduduk miskin mengalami kenaikan 0,16 persen poin atau bertambah sekitar 3.480 orang miskin.

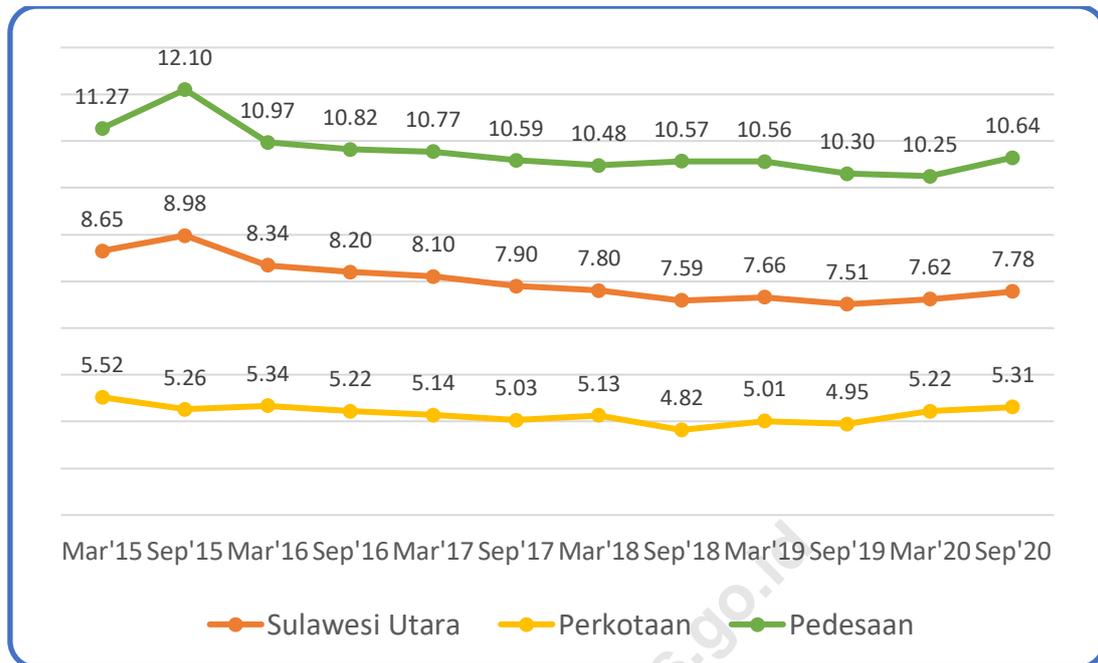
Gambar 3.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara, 2017-2020



Berdasarkan daerah atau wilayah, pada periode Maret 2017 - September 2019 tercatat tingkat kemiskinan daerah perkotaan berada pada kisaran 4,82 – 5,52 persen sedangkan tingkat kemiskinan daerah perdesaan berada pada kisaran 10,25 – 12,10 persen. Berdasarkan angka tersebut terlihat bahwa tingkat kemiskinan daerah perdesaan selalu lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan.

Dalam Gambar 3.2 terlihat tingkat kemiskinan Sulawesi Utara di daerah perkotaan hampir tidak ada perubahan yang relatif signifikan. Dibandingkan kondisi Maret 2020, angka kemiskinan September 2020 naik relatif kecil yaitu 0,09 persen. Sementara, kemiskinan di perdesaan mengalami kenaikan yang lebih besar dibandingkan daerah perkotaan. Kemiskinan perdesaan pada September 2020 mencapai 10,64 persen, naik 0,39 poin dibandingkan Maret 2020. Kenaikan kemiskinan di perdesaan yang lebih tinggi semakin menambah besarnya disparitas kemiskinan antara wilayah perkotaan dan perdesaan di Provinsi Sulawesi Utara.

Gambar 3.2. Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara Menurut Klasifikasi Daerah, 2015-2020



3.2 PERKEMBANGAN GARIS KEMISKINAN

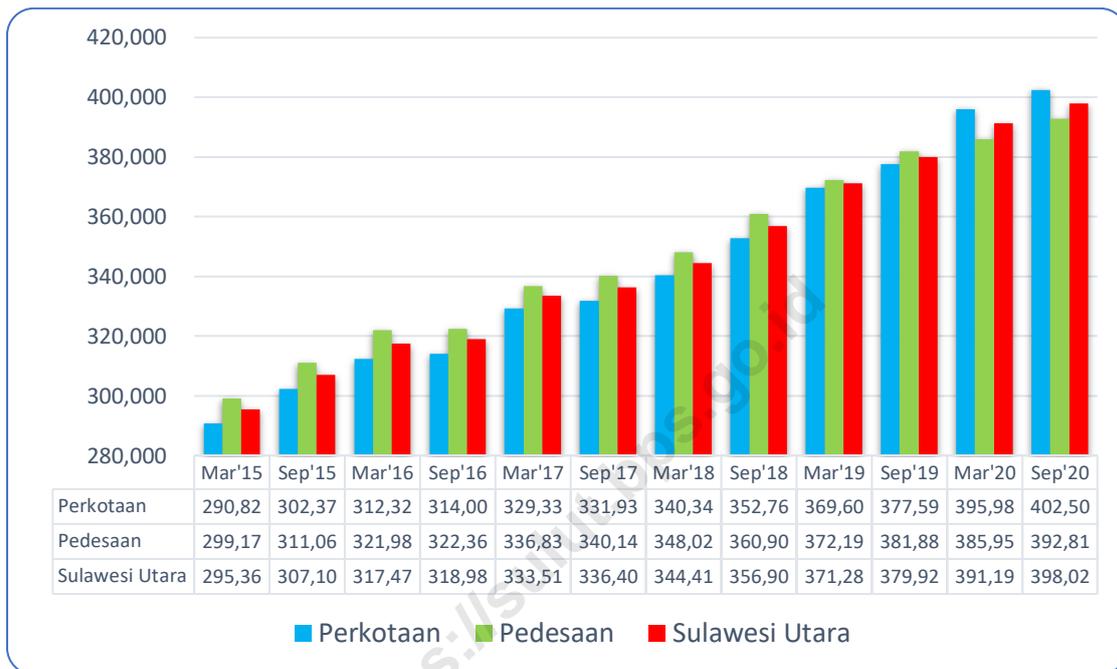
Jumlah penduduk miskin sangat dipengaruhi oleh besarnya Garis Kemiskinan (GK) karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Harga-harga barang dan jasa yang terus mengalami perubahan dengan kecenderungan naik dari waktu ke waktu akibat inflasi, menyebabkan perubahan pula pada angka Garis Kemiskinan. Perubahan Garis Kemiskinan dari waktu ke waktu menunjukkan pola yang cenderung terus naik.

Selama periode Maret 2015-September 2020, Garis Kemiskinan naik sejalan dengan adanya inflasi. Pada Maret 2015 garis kemiskinan tercatat sebesar Rp295.356,- per kapita per bulan dan terus mengalami kenaikan hingga Rp398.026,- per kapita per bulan pada September 2020. Pada periode Maret 2020 – September 2020, GK naik 1,75 persen dari Rp391.197,- per kapita per bulan menjadi Rp398.026,- per kapita per bulan.

Dilihat dari wilayahnya, pada periode Maret 2020 – September 2020, kenaikan GK di wilayah pedesaan lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan. Kenaikan GK

perdesaan pada periode Maret 2020 – September 2020 adalah sebesar 1,78 persen sementara GK di wilayah perkotaan naik 1,65 persen. Kenaikan GK perdesaan yang lebih tinggi dibandingkan perkotaan ini turut berpengaruh pada naiknya angka kemiskinan di wilayah perdesaan.

Gambar 3.3. Garis Kemiskinan Sulawesi Utara, 2015-2020 (Rp/Kapita/Bulan)



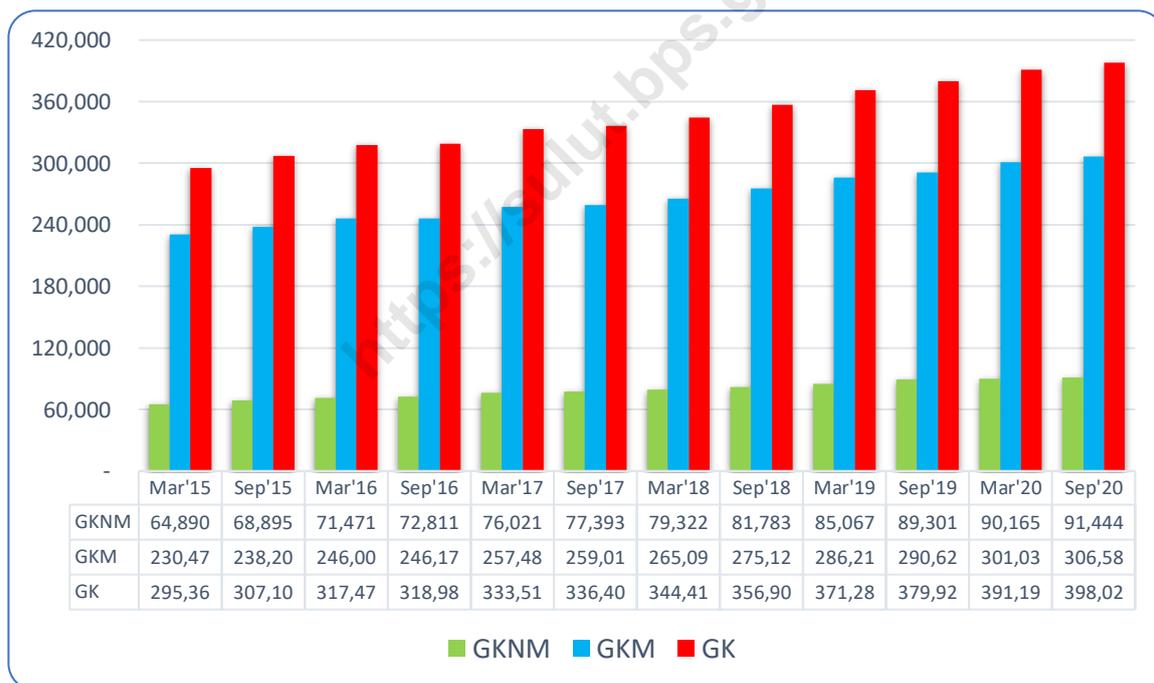
Garis Kemiskinan disusun perdaerah kabupaten/kota. Sehingga, jika ada penduduk miskin di suatu daerah, belum tentu penduduk tersebut merupakan penduduk miskin di daerah lain. Begitu juga sebaliknya, penduduk yang tidak miskin di suatu daerah belum tentu juga tidak miskin di daerah yang lainnya. Misalnya, jika satu penduduk dikategorikan penduduk miskin di Manado, belum tentu penduduk tersebut juga dikategorikan miskin di Bolaang Mongondow Utara.

Garis Kemiskinan Sulawesi Utara pada September 2020 sebesar Rp398.026,-per kapita per bulan. Artinya, jika ada satu rumah tangga terdiri dari ayah, ibu dan 2 anak, maka rumah tangga tersebut dikatakan miskin ketika pengeluaran konsumsinya kurang dari Rp1.592.104,- dalam sebulan. Semua orang di dalam rumah tangga tersebut dikategorikan kedalam penduduk miskin. Sebaliknya, jika rumah tangga tersebut

pengeluaran konsumsinya lebih besar dari Rp1.592.104,- dalam sebulan, maka rumah tangga tersebut tidak dikatakan rumah tangga miskin. Semua orang di dalam rumah tangga tersebut tidak dikategorikan ke dalam penduduk miskin.

Garis Kemiskinan dibentuk dari komponen makanan dan non-makanan yang kemudian disebut dengan Garis Kemiskinan Makanan (GKM) untuk komponen makanan dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) untuk komponen non-makanan. Garis Kemiskinan merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Selanjutnya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin (PM).

Gambar 3.4. Perkembangan GK, GKM, dan GKNM Provinsi Sulawesi Utara, 2015-2020



GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkal per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain). GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi untuk wilayah perkotaan, dan 47 jenis komoditi untuk wilayah perdesaan.

Pada September 2020 GKM Sulawesi Utara sebesar Rp306.583,- per kapita per bulan sedangkan GKNM sebesar Rp91.444,- per kapita per bulan. Sumbangan GKM terhadap GK sebesar 76,50 persen, hal ini menunjukkan bahwa konsumsi makanan menjadi hal yang utama bagi pemenuhan kebutuhan penduduk miskin. Dalam setiap periode, kontribusi pengeluaran makanan (GKM) terhadap total keseluruhan pengeluaran konsumsi dalam membentuk GK cenderung lebih tinggi (kisaran 70 persen) dibandingkan kontribusi pengeluaran non makanan (GKNM).

3.3 KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN

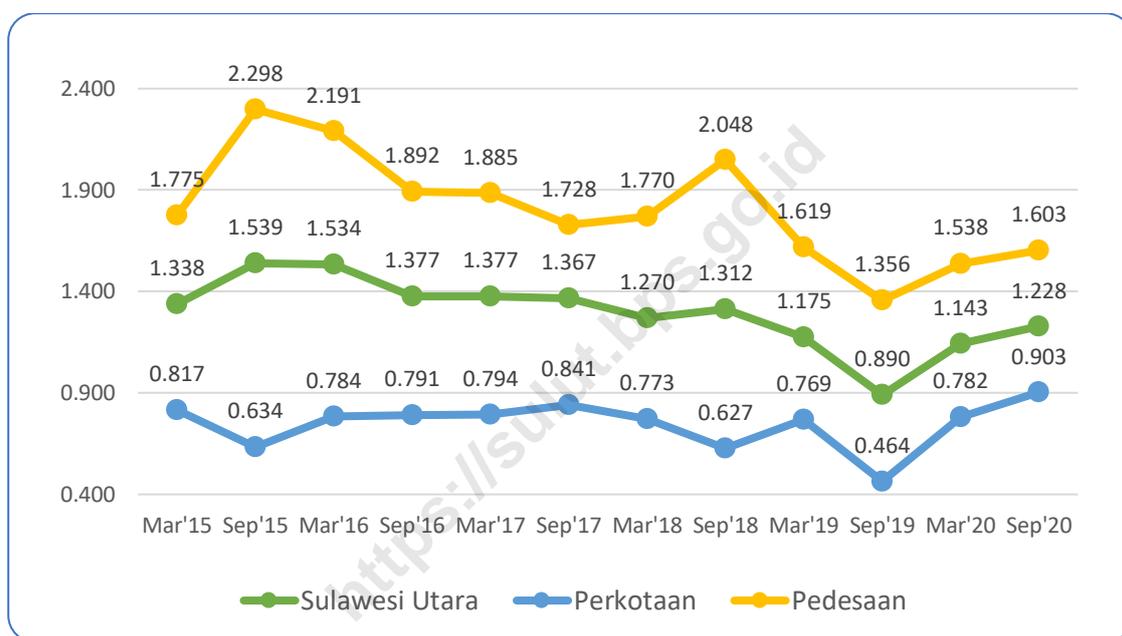
Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap*) dan keparahan kemiskinan (*Poverty Severity*).

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahhan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) memberikan informasi mengenai gambaran penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Selama periode tahun 2015 – 2020 terlihat bahwa indeks kedalaman kemiskinan Sulawesi Utara berfluktuasi naik turun. Indeks kedalaman kemiskinan di daerah perkotaan selalu berada di bawah daerah perdesaan. Ini menggambarkan pada periode ini kondisi kemiskinan di daerah perdesaan lebih buruk dibandingkan di daerah perkotaan. Rata-rata jarak pengeluaran perbulan penduduk miskin di daerah perdesaan terhadap GK cukup

lebar. Pada Maret 2020 - September 2020, angka P1 untuk daerah perkotaan dan pedesaan mengalami kenaikan dibandingkan dengan September 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi kemiskinan di wilayah perkotaan maupun pedesaan makin memburuk. Adanya pandemi Covid-19 yang masuk Indonesia sejak Maret 2020, tidak hanya membuat jumlah penduduk miskin meningkat, namun juga menyebabkan makin dalamnya kemiskinan penduduk di Sulawesi Utara.

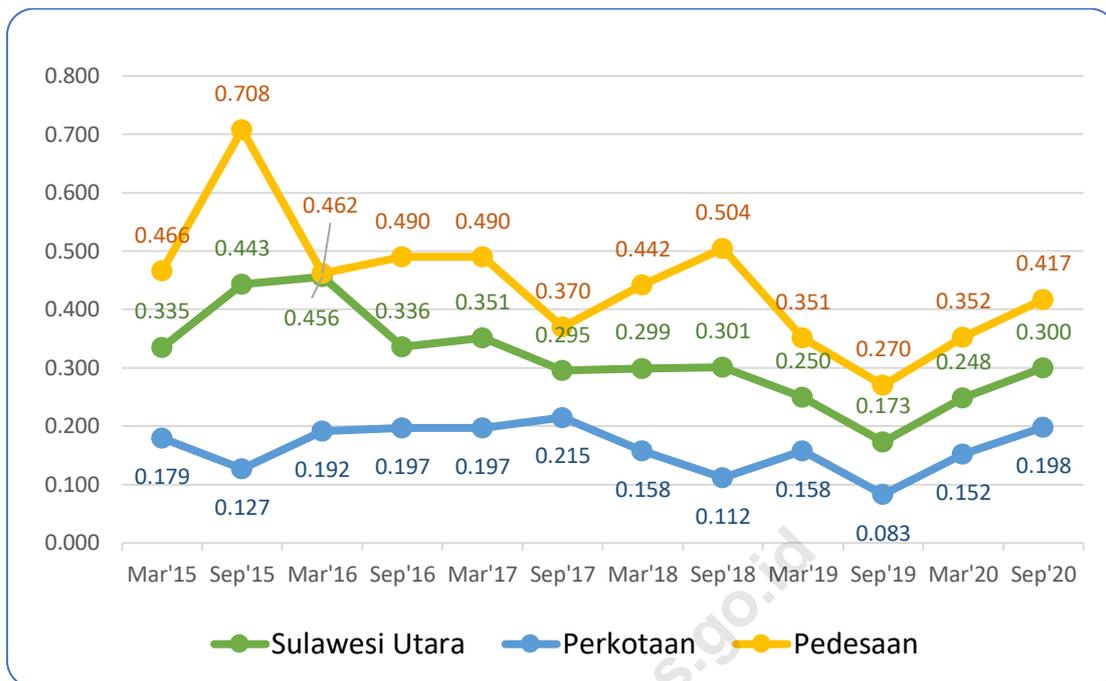
Gambar 3.5. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Sulawesi Utara, 2015-2020



Tak jauh berbeda dengan perkembangan indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan (P2) juga menunjukkan fluktuasi naik turun selama lima tahun terakhir. Gambar 3.6 menunjukkan pola perkembangan P2 dimana daerah pedesaan mengalami ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin yang lebih besar daripada perkotaan.

Selama setahun terakhir yaitu pada Maret 2020 – September 2020, indeks keparahan kemiskinan baik di perkotaan maupun pedesaan mengalami kenaikan dibandingkan dengan kondisi September 2019. Naiknya angka P2 menunjukkan jarak antar penduduk miskin semakin lebar atau penduduk miskin makin heterogen.

Gambar 3.6. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Sulawesi Utara, 2015-2020



DISTRIBUSI PENGELUARAN & KETIMPANGAN PENGELUARAN

GINI RATIO

0,370

(Maret 2020)

0,368

(September 2020)



Perkembangan Gini Ratio Sulawesi Utara pada periode September 2017-September 2020



Keterangan



● Perkotaan



● Pedesaan



● Perkotaan + Pedesaan

BAB IV

DISTRIBUSI DAN KETIMPANGAN PENGELUARAN

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek kemiskinan yang perlu dilihat karena merupakan ukuran kemiskinan relatif. Oleh karena data pendapatan sulit diperoleh, pengukuran distribusi pendapatan didekati dengan menggunakan data pengeluaran. Ukuran yang menggambarkan ketidakmerataan pendapatan yang digunakan oleh BPS adalah koefisien Gini (*Gini Ratio*) dan Ukuran Bank Dunia.

4.1. *Gini Ratio*

Gini ratio merupakan ukuran tingkat ketimpangan pendapatan penduduk yang banyak digunakan di berbagai negara. *Gini Ratio* menggambarkan ketimpangan pada distribusi pengeluaran penduduk. *Gini Ratio* memiliki nilai dalam rentang 0 hingga 1. Semakin mendekati angka 1 artinya ketimpangan semakin besar. Perubahan *gini ratio* memberikan indikasi adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk.

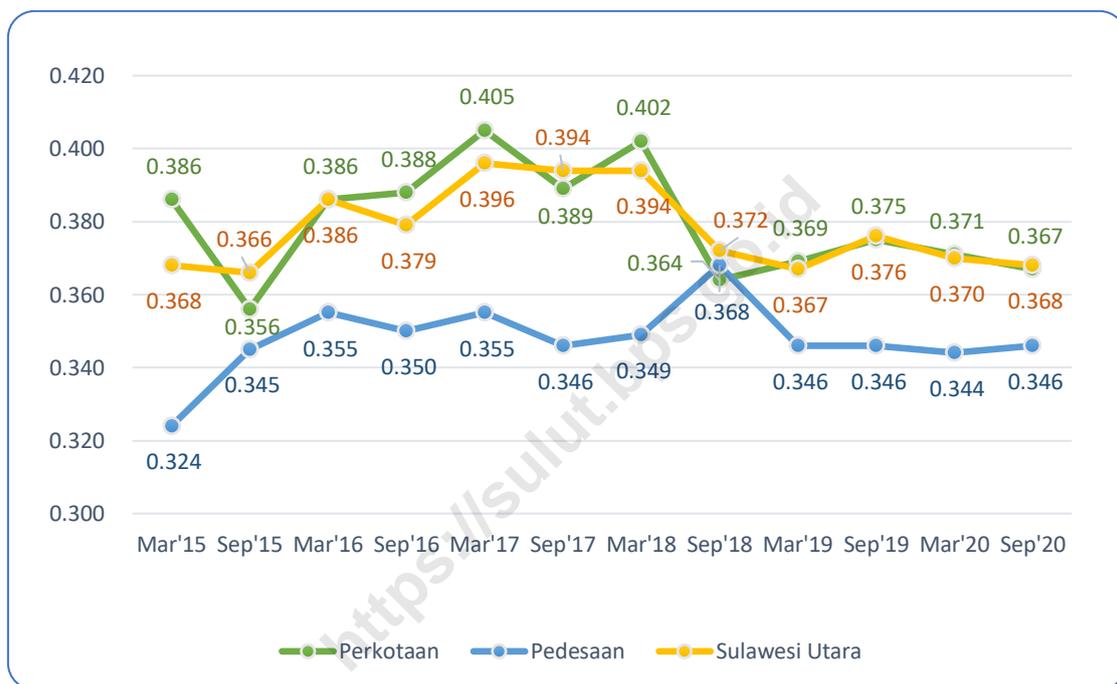
Secara umum, angka *Gini Ratio* Sulawesi Utara pada periode 2015-2020 cenderung mengalami penurunan. Angka *Gini Ratio* Sulawesi Utara sempat mengalami kenaikan cukup tinggi yaitu pada Maret 2017 dimana nilainya mencapai 0,396; nilai tertinggi sepanjang lima tahun terakhir. Hal yang menarik adalah, angka *Gini Ratio* pada September 2020 sama dengan angka *Gini Ratio* pada Maret 2015, yaitu sebesar 0,368. Artinya, dengan berbagai perkembangan yang terjadi, ketimpangan Sulawesi Utara saat ini sama dengan ketimpangan pada lima tahun yang lalu.

Berbeda dengan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan yang dalam periode Maret 2020 – September 2020 mengalami kenaikan, angka *Gini Ratio* justru mengalami penurunan. Pada Maret 2020, terjadi penurunan *Gini Ratio* sebesar 0,006 poin dibandingkan September 2019 dan pada September 2020 terjadi penurunan kembali hingga mencapai 0,368. Hal ini cukup menarik karena penurunan ini tidak serta merta menunjukkan bahwa telah terjadi pemerataan pengeluaran penduduk. Jika ditelisik

lebih lanjut, penurunan *Gini Ratio* ini terjadi karena turunnya pengeluaran penduduk pada kelompok ekonomi menengah sehingga mengakibatkan ketimpangan ikut menurun.

Dilihat dari karakteristik wilayahnya, *Gini Ratio* perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Hal ini memberi arti bahwa pengeluaran penduduk di wilayah perkotaan lebih timpang dibandingkan dengan wilayah perdesaan.

Gambar 4.1. *Gini Ratio* Menurut Klasifikasi Daerah di Sulawesi Utara, 2015-2020



4.2. Kriteria Bank Dunia

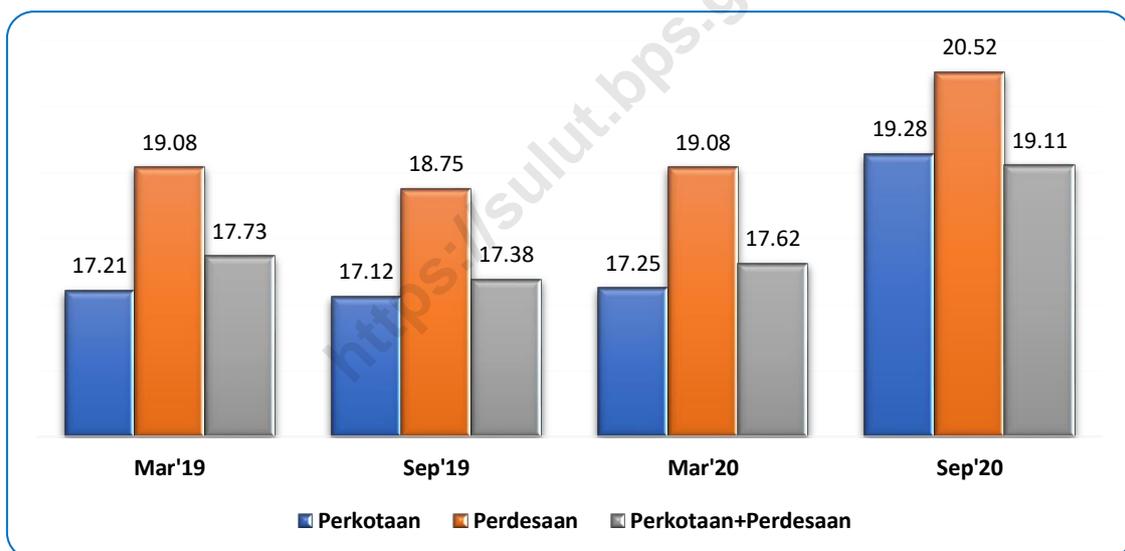
Indikator lain untuk melihat distribusi pengeluaran antar kelompok penduduk adalah Kriteria Bank Dunia. Kriteria Bank Dunia membagi kelompok penduduk menjadi tiga bagian besar yaitu kelompok penduduk 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas.

Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk dengan pengeluaran terendah. Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk ini digambarkan oleh porsi pengeluaran dari kelompok

pengeluaran ini terhadap seluruh pengeluaran penduduk, dengan penggolongan ketimpangan pengeluaran sebagai berikut:

- Ketimpangan pengeluaran tinggi (*highly inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah kurang dari 12 persen;
- Ketimpangan pengeluaran sedang (*moderate inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah berada di antara 12 persen sampai dengan 17 persen;
- Ketimpangan pengeluaran rendah (*low inequality*), jika porsi pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terendah berada di atas 17 persen.

Gambar 4.2. Distribusi Pengeluaran Penduduk 40 Persen Terendah Menurut Daerah dan Kriteria Bank Dunia, 2019-2020



Pada periode 2019-2020 ketimpangan pengeluaran menurut Kriteria Bank Dunia untuk Sulawesi Utara adalah ketimpangan rendah (*low inequality*) baik untuk wilayah Sulawesi Utara secara keseluruhan maupun dilihat menurut daerah perkotaan dan perdesaan (Gambar 4.2).

Halaman ini sengaja dikosongkan

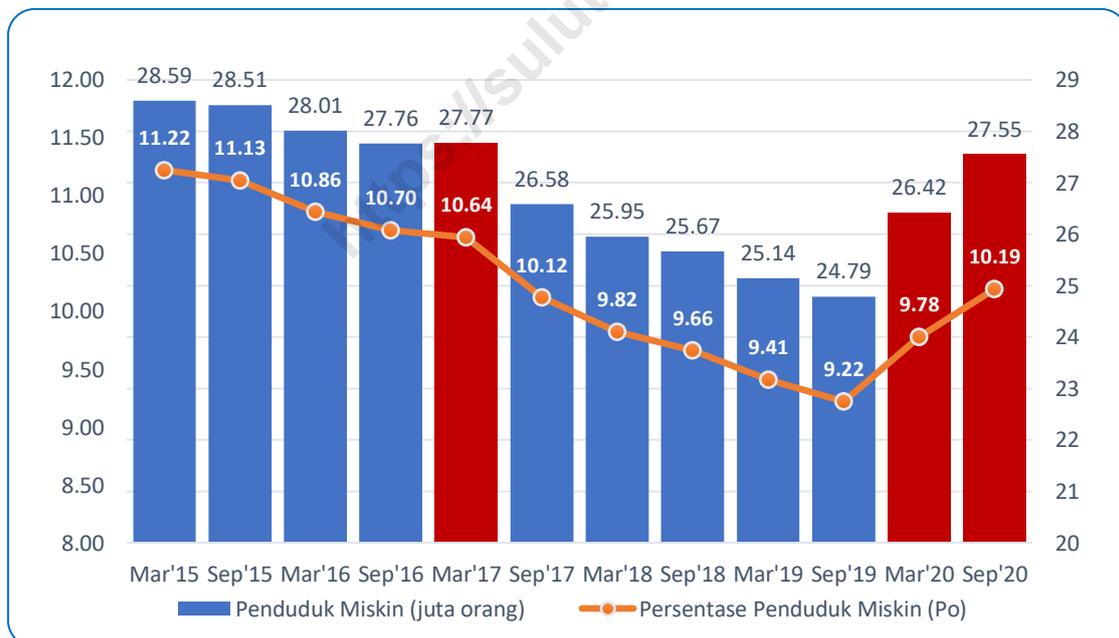
<https://sulut.kps.go.id>

BAB V

PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN SECARA NASIONAL

Perkembangan tingkat kemiskinan Indonesia pada periode 2015-2020 ditunjukkan pada Gambar 5.1. Secara umum, tingkat kemiskinan Indonesia selama 2015-2019 mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Namun selama setahun terakhir, yaitu periode Maret 2020 – September 2020, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah maupun persentasenya. Kemiskinan Indonesia mencapai angka 10,19 persen pada September 2020 dengan jumlah penduduk miskin mencapai 27,55 juta orang. Angka kemiskinan dua digit ini kembali terjadi di Indonesia setelah sebelumnya angka dua digit kemiskinan terjadi terakhir kali pada September 2017.

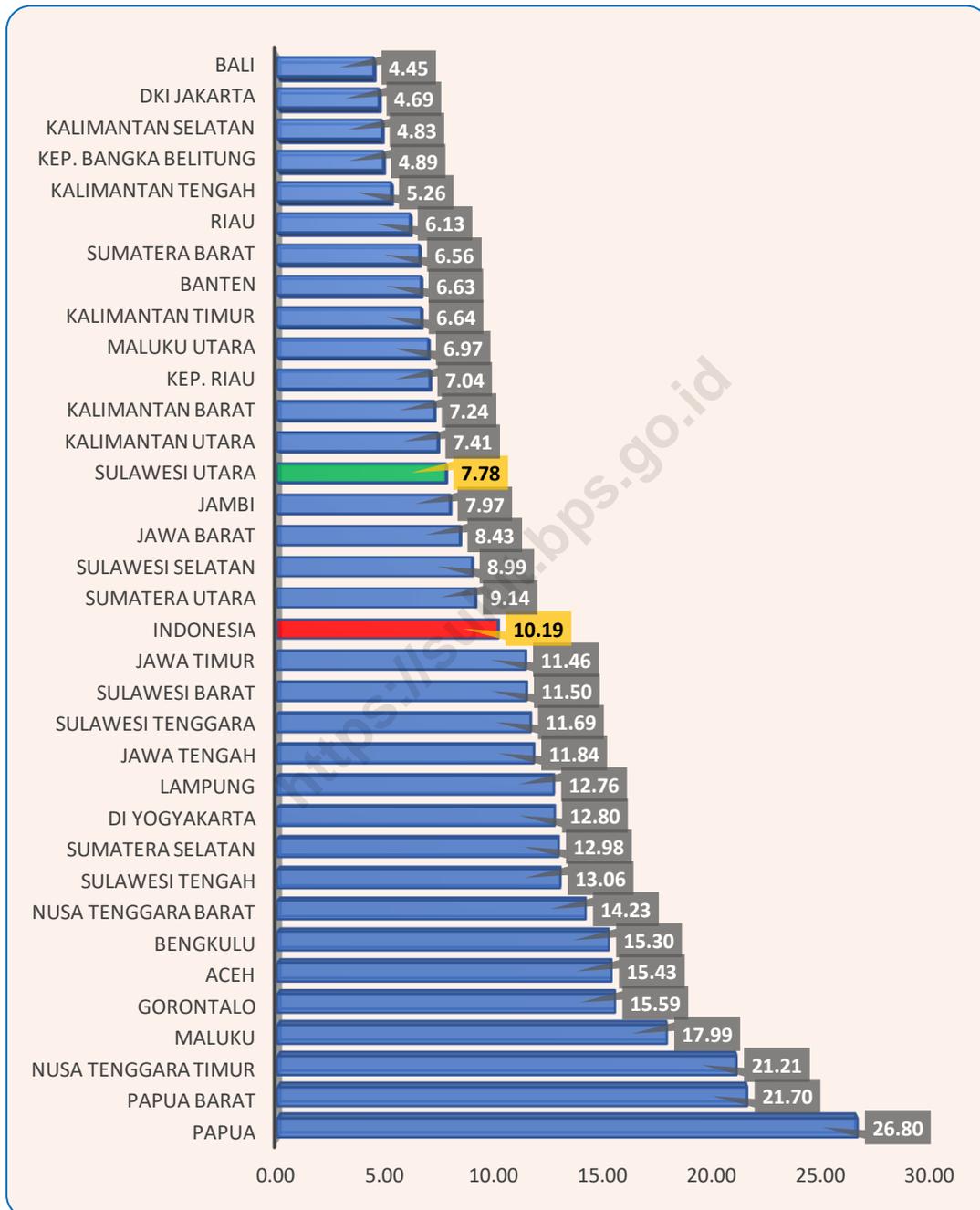
Gambar 5.1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Indonesia, 2015-2020



Secara nasional tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara berada pada posisi terendah ke-14 setelah Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kepulauan Riau,

Maluku Utara, Kalimantan Timur, Banten, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, dan Bali.

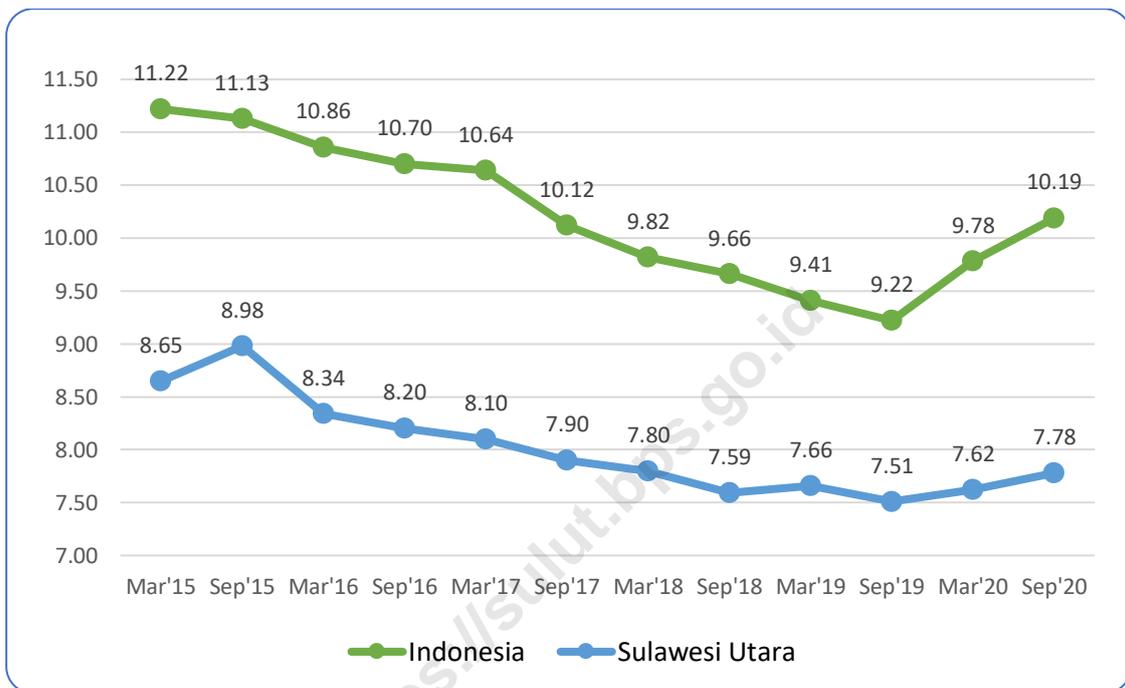
Gambar 5.2. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Indonesia, September 2020



Ketika membandingkan dengan provinsi – provinsi yang ada di Pulau Sulawesi tampak bahwa Sulawesi Utara berada pada posisi terendah tingkat kemiskinannya. Sementara di wilayah Sulampua (Sulawesi, Maluku, Papua), Sulawesi Utara berada di

peringkat kedua terendah setelah Maluku Utara. Dibandingkan dengan angka kemiskinan Indonesia, selama lima tahun terakhir angka kemiskinan Sulawesi Utara juga selalu berada di bawah angka kemiskinan Indonesia.

Gambar 5.3. Persentase Penduduk Miskin Sulawesi Utara dan Indonesia, 2015-2020

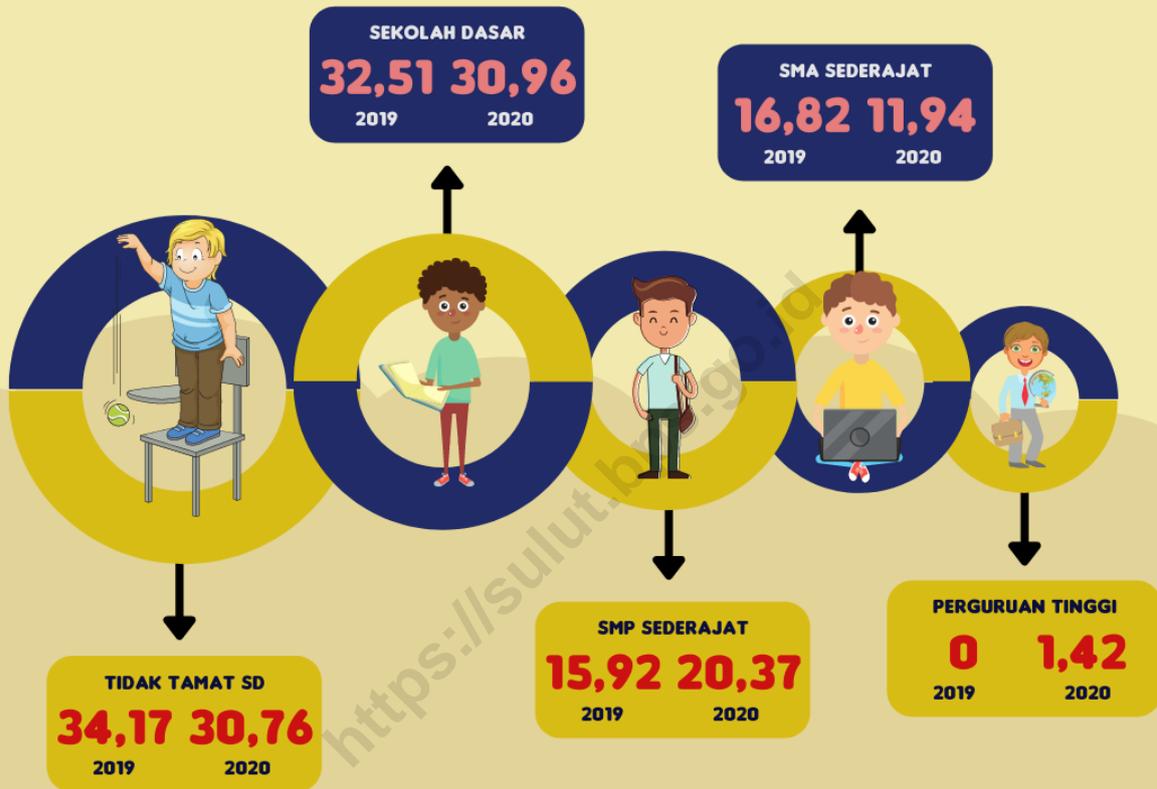


Halaman ini sengaja dikosongkan

<https://sulutbps.go.id>

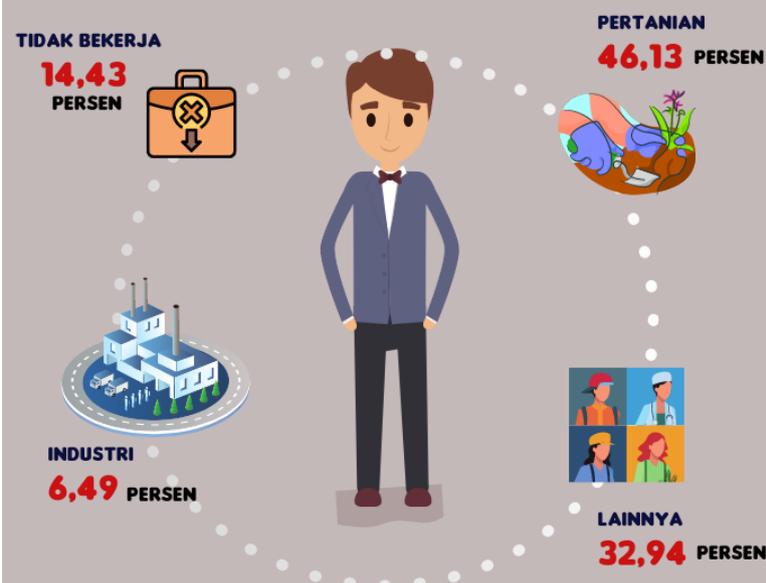
KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISKIN SULAWESI UTARA

PERSENTASE PENDIDIKAN KEPALA RUMAH TANGGA MISKIN 2019-2020



KARAKTERISTIK PEKERJAAN KRT MISKIN TAHUN 2020

PENGELUARAN PERKAPITA PERBULAN TAHUN 2019-2020



BAB VI
KARAKTERISTIK RUMAH TANGGA MISKIN
SULAWESI UTARA

Berbicara mengenai masalah kemiskinan tentu akan lebih menarik jika dikaitkan dengan karakteristik penduduk atau rumah tangga miskin, seperti sosial demografi, pendidikan, ketenagakerjaan, perumahan, dan pengeluaran perkapita per bulan. Dengan mengetahui gambaran karakteristik rumah tangga miskin, diharapkan pemerintah dapat menyusun kebijakan yang tepat sasaran dalam pengentasan kemiskinan.

6.1. KARAKTERISTIK SOSIAL DEMOGRAFI

Karakteristik sosial demografi yang disajikan pada profil rumah tangga miskin meliputi rata-rata jumlah anggota rumah tangga, persentase perempuan sebagai kepala rumah tangga, rata-rata usia kepala rumah tangga, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga (dilihat dari indikator rata-rata lamanya bersekolah kepala rumah tangga). Keempat karakteristik tersebut dibandingkan dengan melihat proporsi rumah tangga yang dikategorikan miskin dan tidak miskin (Tabel 6.1)

Tabel 6.1 Karakteristik Sosial Demografi Rumah Tangga Miskin dan Rumah Tangga Tidak Miskin, 2019-2020

Karakteristik Rumah Tangga (1)	Miskin		Tidak Miskin	
	2019 (2)	2020 (3)	2019 (4)	2020 (5)
1. Rata-rata jumlah anggota rumah tangga (orang)	5,33	5,10	3,73	3,66
2. Persentase Perempuan sebagai kepala rumah tangga (%)	9,06	11,92	14,61	14,38
3. Rata-rata umur kepala rumah tangga (tahun)	48,03	49,30	49,33	49,54
4. Rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga (tahun)	6,71	7,08	9,31	9,36

Pada Tabel 6.1 terlihat bahwa rumah tangga miskin cenderung memiliki anggota rumah tangga yang lebih banyak. Anggota rumah tangga miskin berkisar antara 5-6 orang

sedangkan rumah tangga tidak miskin hanya beranggotakan 3-4 orang. Pada rumah tangga miskin, rata-rata umur kepala rumah tangga lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata umur kepala rumah tangga yang tidak miskin. Begitu juga, dalam hal rata-rata lama sekolah, rumah tangga miskin cenderung lebih rendah rata-rata lama sekolahnya dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Hal ini bisa jadi karena rumah tangga miskin tidak memiliki biaya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Sementara itu, dilihat dari jenis kelamin kepala rumah tangga, persentase perempuan sebagai kepala rumah tangga di rumah tangga miskin cenderung lebih sedikit dibandingkan dengan rumah tangga tidak miskin. Namun begitu, persentase perempuan sebagai kepala rumah tangga di rumah tangga miskin menunjukkan adanya peningkatan pada tahun 2020. Hal yang melatar belakangi wanita menjadi seorang kepala rumah tangga bisa disebabkan karena wanita ini belum pernah menikah dan mendirikan rumah tangga sendiri atau mengambil alih tanggung jawab kepala keluarga dimana ia menjadi anggota, faktor perceraian, ataupun suami tidak dapat mencari nafkah lagi sehingga istri menggantikan posisinya mencari nafkah.

6.2. KARAKTERISTIK PENDIDIKAN

Pendidikan merupakan suatu sarana untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia. Tingkat pendidikan berperan dalam mempengaruhi angka kemiskinan. Orang yang berpendidikan lebih tinggi biasanya akan mempunyai peluang yang lebih rendah untuk menjadi miskin.

Berdasarkan pendidikan tertinggi yang ditamatkan, persentase kepala rumah tangga miskin yang berpendidikan rendah (tidak tamat SD dan SD/ sederajat) lebih tinggi dibanding rumah tangga tidak miskin. Hal ini sejalan dengan yang disajikan pada Tabel 6.1 bahwa kepala rumah tangga miskin memiliki rata-rata lama sekolah yang lebih rendah dibandingkan kepala rumah tangga tidak miskin.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Pendidikan Kepala Rumah Tangga, 2019-2020

Pendidikan Kepala Rumah Tangga	Miskin		Tidak Miskin	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak tamat SD	34,17	30,76	17,35	15,96
SD Sederajat	32,51	30,96	20,84	22,51
SMP Sederajat	15,92	20,37	17,79	17,12
SMA Sederajat	16,82	11,94	33,68	34,55
Perguruan Tinggi	-	1,42	10,34	9,87

6.3. KARAKTERISTIK KETENAGAKERJAAN

Sumber penghasilan utama menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan yang diharapkan dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi suatu rumah tangga. Karakteristik ketenagakerjaan yang dapat menggambarkan adanya perbedaan antara rumah tangga miskin dan tidak miskin adalah lapangan usaha atau sumber penghasilan utama rumah tangga dan status pekerjaan.

Tabel 6.3 Persentase Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin Menurut Sumber Penghasilan Utama Kepala Rumah Tangga, 2019-2020

Sumber Penghasilan Utama rumah tangga	Miskin		Tidak Miskin	
	2019	2020	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tidak Bekerja	10,07	14,43	15,79	15,54
Pertanian	46,34	46,13	27,95	27,20
Industri	8,05	6,49	5,68	5,43
Lainnya	35,54	32,94	50,58	51,94

Berdasarkan Tabel 6.3 terlihat bahwa rumah tangga miskin menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian (46,13 persen). Sementara itu, untuk rumah tangga tidak miskin pada umumnya berpenghasilan utama dari sektor lainnya (51,94 persen).

Menurut sektornya, pekerja dibagi menjadi dua yaitu pekerja formal dan informal. Pekerja informal adalah pekerja yang mempunyai status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non-pertanian serta pekerja keluarga tidak dibayar. Penduduk miskin cenderung lebih banyak yang bekerja pada sektor informal daripada sektor formal. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 6.3 di mana persentase penduduk miskin usia 15 tahun ke atas yang bekerja di sektor informal pada tahun 2019-2020 lebih besar dibandingkan yang bekerja pada sektor formal.

Tabel 6.4 Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Status Bekerja, 2019-2020

Status Bekerja	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Bekerja di Sektor Informal	33,31	27,57
Bekerja di Sektor Formal	17,17	18,10

6.4. KARAKTERISTIK PERUMAHAN

a. Jenis Jamban

Ketersediaan jamban menjadi salah satu fasilitas rumah sehat. Fasilitas jamban dibedakan atas jamban sendiri/bersama dan jamban umum/tidak ada. Persentase rumah tangga miskin di Sulawesi Utara tahun 2020 yang menggunakan jamban sendiri sebesar 79,96 persen. Sementara persentase rumah tangga miskin di Sulawesi Utara yang menggunakan jamban bersama/komunal maupun yang tidak ada jamban adalah sebesar 20,04 persen.

Tabel 6.5 Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Jenis Jamban, 2019-2020

Status Bekerja	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Jamban Sendiri/Bersama	77,40	79,96
Jamban Umum/Tidak ada	22,60	20,04

b. Luas Lantai

Salah satu indikator perumahan yang digunakan untuk menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga adalah keleluasaan pribadi (*privacy*) dalam tempat tinggal. Keleluasaan pribadi tercermin dari luas lantai rumah per kapita (m^2). Menurut Departemen Kesehatan, salah satu syarat rumah dikatakan sehat adalah luas lantai rumah per kapitanya minimal $8 m^2$. Pada tahun 2020, persentase rumah tangga miskin dengan luas lantai bangunan tempat tinggal per kapita $\leq 8 m^2$ yaitu sebesar 45,05 persen.

Tabel 6.6 Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Luas Lantai, 2019-2020

Status Bekerja	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Luas lantai per kapita $\leq 8 m^2$	40,93	45,05
Luas lantai per kapita $> 8 m^2$	59,07	54,95

c. Sumber Air Minum

Ketersediaan air layak sebagai sumber air minum merupakan indikator perumahan yang mencirikan sehat tidaknya suatu rumah. Sumber air berkualitas menyediakan air yang aman untuk diminum bagi masyarakat. Air yang tidak berkualitas adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit. Semakin besar persentase rumah tangga yang menggunakan sumber air minum layak menunjukkan semakin baiknya kondisi rumah tangga di suatu daerah. Pada tahun 2020, rumah tangga miskin yang menggunakan sumber air minum layak adalah sebesar 67,23 persen.

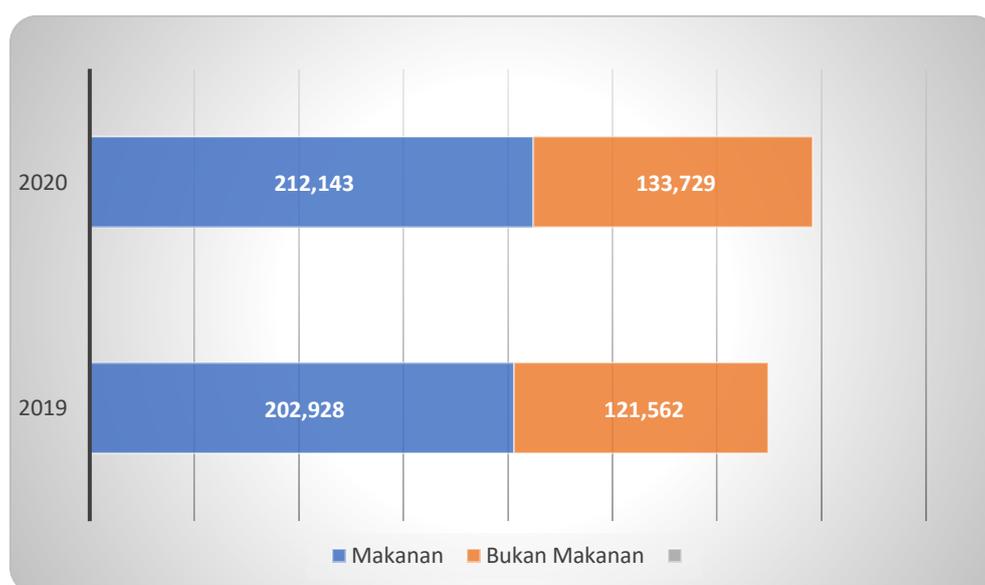
Tabel 6.7 Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Sumber Air Minum, 2019-2020

Sumber Air Minum	2019	2020
(1)	(2)	(3)
Air Layak	69,80	67,23
Air Tidak Layak	30,20	32,77

6.5. PENGELUARAN PER KAPITA PER BULAN

Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat dari status miskin atau tidak miskin suatu rumah tangga yang ditentukan dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan suatu rumah tangga. Pengeluaran penduduk dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu pengeluaran untuk membiayai komoditi makanan dan pengeluaran untuk membiayai komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sebagian besar pengeluaran per kapita per bulan rumah tangga miskin digunakan untuk membiayai komoditi makanan. Pada tahun 2020 pengeluaran per kapita per bulan pada rumah tangga miskin di Sulawesi Utara untuk komoditi makanan yaitu sebesar Rp202.928. Sedangkan pengeluaran untuk komoditi non makanan adalah sebesar Rp121.562.

Gambar 6.1. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita Per Bulan Penduduk Miskin, 2019-2020



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI UTARA**

Jl. 17 Agustus Manado 95119 | Mailbox: bps7100@bps.go.id
Instagram: @bps_sulut | Facebook: BPS Provinsi Sulawesi Utara
Youtube: BPS Provinsi Sulawesi Utara
Website: <https://sulut.bps.go.id>

ISSN 2598-2621



9 772598 262009